

Pendidikan Pemilih sebagai Metode Meningkatkan Partisipasi dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu

Zakaria Ansori

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Mataram

Email: zakariaansori@uinmataram.ac.id

Abstrak: Artikel ini diolah dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pokok bahasannya tentang pendidikan pemilih terhadap pemilih pemula. Dilatarbelakangi oleh fenomena beberapa negara demokrasi dalam tahun-tahun terakhir yang menunjukkan semakin menurunnya partisipasi pemilih. Dalam usaha merespon fenomena tersebut, pengabdian ini memiliki dua tujuan. *Pertama*, meningkatkan pengetahuan siswa/siswi tentang kepemiluan dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Kedua*, meningkatkan keterampilan siswa/siswi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Muatan materi yang diberikan ada tiga aspek, yakni; (1) pemilu dan demokrasi; (2) sistem pemilu; (3) praktik pemilu di Indonesia. Hasil pengabdian memperlihatkan adanya perubahan pemahaman siswa/siswi tentang pemilu sekaligus perubahan sikap mereka terhadap isu golput.

Kata Kunci: Pendidikan Pemilih, Partisipasi Politik, Keterampilan Pemilih, Pemilu

Abstract: This paper, a report from a community service project, mainly discusses the notion of voting education for beginner voters amid increasingly low participation of voters' participation in some democratic states. For this reason, the project reported in this paper has two primary purposes: first, help students' develop the knowledge of election within the Indonesian political sphere; second, encourage the students to use their rights in the election. There were three designed materials employed: (1) election and democracy; (2) election system; (3) election practice in Indonesia. The findings showed that the project training could change the students' attitude pertinent to the election and encourage them not to abstain in the election.

Keywords: Voting education, political participation, voters' competence, general election

Pendahuluan

Memberikan suara dalam pemilu, merupakan bentuk partisipasi politik konvensional individu paling minimal sebagai warga negara.¹ Oleh karena itu, fenomena menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam ikut memilih menjadi kekhawatiran banyak negara demokrasi era ini. Secara terminologis, ketidakhadiran masyarakat dalam pemberian suara pada pemilu dikonsepsikan sebagai golongan putih (golput). Perkataan lainnya, golput merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan sikap masyarakat ketika tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau tidak hadir memilih.

Beberapa negara menunjukkan angka golput pemilunya berada pada kondisi memprihatinkan. Di kawasan Asia, misalnya Thailand menjadi negara paling tinggi angka golput-nya. Pada pemilu bulan Februari tahun 2014, warga negara Thailand yang berpartisipasi dalam pemungutan suara hanya 46,79%, artinya angka golput mencapai 53,21%. Di kawasan Eropa Timur, negara Lithuania yang memiliki populasi 2,9 juta, pada pemilu tahun 2012, angka partisipasi pemilih hanya 35,91%, maka artinya golput mereka mencapai 64,09%.

Sementara itu, di kawasan Amerika Utara, negara Haiti dari 3,5 juta rakyat yang terdaftar dalam daftar pemilih, hanya 28,31 % yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2006. Maka artinya angka golput mencapai 71,69 %. Di kawasan Benua Afrika, Nigeria pada pemilu 2011, dari 73,5 juta penduduk terdaftar, hanya 28,9% yang menyalurkan suaranya. Ini artinya angka golput men-

¹ Budi Suryadi, *Sosiologi Politik; Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep* (Jogjakarta, IRCiSoD, 2007), hlm.133. Suryadi meminjam penjelasan Almond (1993) dalam menerangkan dua macam partisipasi politik, yaitu kegiatan politik konvensional dan non-konvensional. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk partisipasi politik konvensional adalah; pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pejabat politik dan administrasi. Bentuk partisipasi politik non-konvensional adalah yang tidak normal, meskipun demikian bisa legal (seperti petisi) maupun yang illegal seperti kekerasan dan revolusioner. Di antara bentuk-bentuknya adalah mogok, berdemonstrasi, mogok, tindak kekerasan politik

capai 71,1%. Pada pemilu 2012, di negara ini hanya 19,44% rakyat mencoblos dari 796,9 ribu pemilih terdaftar. Artinya angka golput mencapai 80,56%.²

Statistik pemilu di atas menunjukkan rendahnya partisipasi memilih masyarakat atau tingginya angka golput di banyak negara sudah berada pada posisi yang mengawatirkan secara politik. Pada negara-negara di atas, rata-rata angka golput sudah berada di atas angka partisipasi pemilih. Artinya warga negara yang tidak menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan hak pilih. Fenomena ini sekaligus menandakan tumbuhnya gejala a-politik masyarakat. Bagi kelompok masyarakat a-politik, mereka memandang politik bukan lagi urusannya. Politik dipandang tidak memberikan *impact* langsung bagi masyarakat, politik tidak memberikan pengaruh ekonomi bagi masyarakat. Dan karena itu, politik hanyalah merupakan urusan elit.

Di Indonesia angka golput masih dalam posisi yang proporsional. Pada pemilu anggota DPR dan DPD tahun 2014, misalnya dari 187.852.992 warga negara terdaftar dalam daftar pemilih, yang menggunakan hak pilihnya 75,55%, atau angka golput mencapai 24,45%.³ Data ini memperlihatkan secara nasional angka partisipasi pemilih Indonesia masih lebih tinggi apabila dibandingkan beberapa negara lain.

Lombok Tengah sebagai kabupaten tempat pengabdian ini dilaksanakan, angka partisipasi pemilih di setiap kecamatan memiliki keberagaman. Dari 12 kecamatan yang ada, angka partisipasi pemilih Lombok Tengah cukup beragam. Kecamatan Pujut merupakan daerah paling tinggi angka partisipasi pemilihnya, disusul Praya Timur, Praya, Praya Barat, Praya Tengah, Praya Barat Daya, Janapria, Batu Kliang, Batu Kliang Utara, Jonggat, Pringgarata, dan Kopang.

Praya merupakan Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki keberagaman atau pluralitas. Praya dihuni penduduk dari

² <http://kumpulan-berita-unik.blogspot.co.id/2014>, dikutp tanggal 25 Februari 2017

³ Komisi Pemilihan Umum, Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI Tahun 2014, hlm 278

semua agama dan beragam suku bangsa. Sebagai Ibu Kota dengan pusat perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan di Lombok Tengah, Praya merupakan pertemuan penduduk Lombok Tengah dari semua kecamatan yang ada. Oleh karena itu, Praya merupakan representasi dari masyarakat Lombok Tengah. Berdasarkan kondisi tersebut, pengabdian ini mengambil lokasi di Kota Praya, persisnya di Pondok Pesantren Darul Muhajirin-Praya. Fokus pengabdian ini pada dua poin. *Pertama*, pemahaman siswa/siswi MA Darul Muhajirin sebagai pemilih pemula tentang pemilu dan pandangan mereka tentang golput sebelum pemberian materi kepemiluan oleh narasumber. *Kedua*, pemahaman siswa/siswi MA Darul Muhajirin sebagai pemilih pemula tentang pemilu dan pandangan mereka tentang golput sebelum pemberian materi kepemiluan. Lokasi pengabdian di MA Darul Muhajirin Praya. MA ini terletak di Kota Praya sebagai Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah.

Pembahasan

1. Sosialisasi Politik Sebagai Pendidikan Politik

Cara paling sederhana mendefinisikan sosialisasi politik adalah dengan menggabungkan makna sosialisasi dan politik. Meskipun demikian, penggabungan ini tidak sederhana karena definisi politik yang dikemukakan para ahli masih beragam. Damsar mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses trenaformasi pengetahuan, sikap, dan nilai politik kepada masyarakat agar masyarakat mampu berpartisipasi politik secara efektif.⁴ Kesimpulan ini merupakan perpaduan dari pendapat beberapa ahli, sebagai berikut:

1. M.Rush dan P.Althoff, dalam bukunya yang diberi judul *Sosiologi Politik*, tahun 2005, mereka mengatakan sosialisasi politik adalah suatu proses kerja terhadap dua hal. *Pertama*, memperkenalkan sistem politik kepada peserta sosialisasi politik. *Kedua*, meminta respon atau tanggapan mereka tentang gejala-gejala politik.

⁴Prof.Dr.Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.154

2. A.Thio, dalam bukunya *Sociology: An Introduction*, tahun 1989, Thio mengatakan, sosialisasi politik sebagai proses melalui mana individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan, dan sikap politik.
3. Gabriel A.Almond, mengatakan sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang secara khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik.⁵

Paparan definisi sosialisasi politik di atas mempertegas, kerja sosialisasi politik pada dua aspek, yaitu ; aspek yang berhubungan dengan proses dan aspek yang berhubungan dengan tujuan. Pada aspek pertama, kerja sosialisasi politik merupakan transformasi nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap politik, serta harapan politik. Adapun aspek kedua, merujuk pada sesuatu yang diperlukan oleh individu agar mampu berpartisipasi efektif dalam aspek politik dan kehidupan masyarakat.

2. Agen Sosialisasi Politik

Agen sosialisasi politik dapat dilakukan oleh berbagai aktor, baik individu, kelompok atau organisasi. Damsar membuat identifikasi terhadap empat agen sosialisasi strategis, yakni; keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media massa. Menurut Damsar, agen-agen ini paling penting perannya dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensi manusia.⁶ Apa yang dirumuskan oleh Damsar tidak lebih sebagai salah satu panduan bagi setiap ahli untuk merumuskan identifikasi agen-agen lainnya. Penulis berpandangan ada banyak agen lain yang dapat mengambil peran dalam sosialisasi politik, seperti elit informal (kyai, buya, atau tuan guru, termasuk tokoh-tokoh budaya), organisasi-organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat.

a. Keluarga

Di dalam keluarga, sosialisasi politik dapat berjalan melalui dua bentuk, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatif. Ben-

⁵ Ibid, hlm.153

⁶ Ibid, hlm.154

tuk sosialisasi politik ini sangat ditentukan oleh karakteristik orang tua, karena orang tua merupakan aktor dominan dalam pembentukan peran anggota keluarga. Pada tahapan yang ekstrim bahkan muncul asumsi, “*watak dan prilaku anak merupakan potret dari watak dan perilaku orang tua*”. Damsar mendefinisikan sosialisasi represif sebagai sosialisasi yang lebih menekankan pada kepatuhan anak dan pemberian hukuman terhadap perilaku yang keliru. Misalnya, orang tua yang mengharuskan anak untuk taat terhadap apapun perintah orang tua, atau anak di larang makan sebelum orang tua makan, melarang anak ikut berdiskusi ketika orang tua sedang mendiskusikan suatu hal, dan memberikan hukuman bagi anak yang melanggar nilai atau norma sosial. Sedangkan sosialisasi partisipatif, menunjuk pada sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak, dan biasanya memberikan imbalan pada anak yang baik. Apabila pada pola sosialisasi represif, anak mendapatkan tekanan yang begitu hebat hingga tidak diperbolehkan nimbrung dalam diskusi orang tua, maka pada pola sosialisasi partisipatif, berlaku pakem yang sebaliknya, orang tua cenderung melibatkan anaknya dalam mendiskusikan hampir semua rencana-rencana yang akan dilakukan.

Pola sosialisasi anak yang diperoleh melalui keluarga diyakni para ilmuwan sosial akan memberi *impack* pada sikap dan perilaku politik anak ketika menjadi dewasa. Ketika politisi yang waktu anak-anak mendapatkan sosialisasi politik represif, kecenderungannya akan tumbuh menjadi politisi yang diktator. Sebaliknya, karekter politik demokratis seorang politisi, biasanya muncul karena pola sosialisasi politik di keluarga yang partisipatif. Damsar mencoba membuat rumusan bentuk sosialisasi politik yang berbeda ini, sebagaimana tabel berikut.

Tabel.1. Bentuk Sosialisasi Politik

| Sosialisasi Represif | Sosialisasi Partisipatif |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menghukum perilaku yang keliru • Hukuman dan imbalan material • Kepatuhan anak • Komunikasi sebagai perintah • Komunikasi nonverbal • Sosialisasi yang berpusat pada orang tua | <ul style="list-style-type: none"> • Memberi imbalan bagi perilaku yang baik • Hukuman dan imbalan simbolis • Otonomi anak • Komunikasi sebagai interaksi • Komunikasi verbal • Sosialisasi yang berpusat pada anak |

| Sosialisasi Represif | Sosialisasi Partisipatif |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anak memperhatikan keinginan orang tua • Keluarga merupakan <i>significant other</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Orang tua memperhatikan keperluan anak • Keluarga merupakan <i>generalized other</i> |

Sumber : Damsar, hlm.155

Pada masyarakat pedesaan sebelum tahun 1990-an, hampir semua orang tua menerapkan pola sosialisasi represif pada anak. Kebetulan penulis tinggal dan besar dilingkungan pedesaan dan masa kecil penulis dalam keluarga banyak kekurangan secara ekonomi, sebagaimana juga jamak terjadi pada masyarakat pedesaan saat itu. Ikan tongkol (sejenis ikan laut) waktu itu merupakan makanan yang mewah, dan setiap makanan mewah, maka yang didahulukan adalah orang tua. Jadi ada tuntutan bagi setiap anak dipedesaan untuk memperhatikan keinginan orang tua sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan anak terhadap orang tua.

Penulis berpandangan, fenomena pola sosialisasi represif dalam keluarga menyebabkan hampir semua pemimpin politik saat itu tampil dengan pola-pola diktator, mulai dari kepala desa hingga presiden. Maka perilaku politik masyarakat juga cenderung mengamini pemimpin-pemimpin yang dipandang kuat secara fisik. Disitulah area subur bagi legitimasi politik militer dan birokrasi, sehingga karakteristik politik di sekitar tahun 1990-an, menurut penulis adalah politik teknokratik, yaitu sistem politik yang dikuasai militer dan birokrasi. Kekuasaan presiden Soeharto, misalnya ketika itu di topang oleh mesin politik A, B, G (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Mesin politik ini bekerja dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Warga masyarakat kemudian di tutntut kepatuhannya terhadap penguasa, dan menyebabkan Soeharto mampu berkuasa 32 tahun, sebagai presiden paling lama dalam sejarah politik Indonesia.

b. Sekolah

Pertanyaannya, mengapa sekolah menjadi agen penting sosialisasi politik? Sedikitnya ada dua faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebabnya, yaitu karena sekolah sebagai sistem sosial dan karena di sekolah guru merupakan figur sentral bagi siswa. Yang

dimaksud dengan sekolah sebagai sistem sosial adalah, sekolah merupakan wadah di mana didalamnya ada sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang hubungan timbal baliknya kurang lebih bersifat konstan. Di sekolah hubungan sosial antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, dan guru dengan Kepala Sekolah, semuanya bersifat konstan atau relatif permanen. Sifat konstanitas hubungan sosial di sekolah memberi ruang yang efektif untuk proses sosialisasi politik.

Guru, merupakan agen sosialisasi yang penting untuk proses sosialisasi politik. Sudah barang tentu karena guru merupakan figur yang tidak hanya berfungsi sebagai transformasi nilai-nilai dan transformasi ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, guru menjadi model bagi tindak-tanduk, cara berpikir, dan sikap siswa. Penampilan (*performance*) guru, menjadi rujukan utama siswa. Oleh karena itu, ucapan, nasehat dan perintah guru menjadi "fatwa" yang wajib ditaati oleh siswa. Dalam posisi sosial yang demikian, guru menjadi penyampai pesan sosialisasi strategis di sekolah.

Gaya kepemimpinan guru, merupakan faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas siswa di ruang kelas. Damsar membagi tiga jenis gaya kepemimpinan guru yang kemudian dapat mempengaruhi proses sosialisasi politik melalui agen sekolah, yaitu; otokratik, demokratik, dan *laisser-fair*.⁷ Gaya kepemimpinan guru yang relevan dengan sosialisasi politik adalah gaya kepemimpinan demokratik. Gaya kepemimpinan demokratik diyakini mampu membangun sikap kritis sekaligus konstruktif bagi siswa. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan demokratik merupakan solusi pendidikan sepanjang zaman. Dengan demikian, apabila sekolah masih dipandang efektif sebagai agen sosialisasi politik, maka kompetensi guru tentang kepolitikan menjadi kebutuhan untuk dihadirkan.

c. Kelompok teman sebaya

Dalam tradisi sosiologi, kelompok teman sebaya (*peer group*), didefinisikan sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama, dengan siapa seseorang itu bergaul

⁷Ibid, hlm.162

atau berhubungan. Biasanya kelompok teman sebaya merupakan kelompok rujukan (*reference group*) dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang berhubungan dengan politik.

Sosialisasi politik melalui kelompok teman sebaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi cara yang dipandang efektif melaksanakan sosialisasi di kelompok teman sebaya adalah dengan sosialisasi informal dan tatap muka langsung. Sosialisasi politik melalui teman sebaya banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga publik. Salah satu lembaga publik yang memiliki program sosialisasi politik melalui teman sebaya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah pemilih yang tinggi dibandingkan jumlah pegawai KPU yang terbatas, menjadi salah satu motivasi KPU membentuk komunitas pemilu dan demokrasi. KPU membuat pengelompokan segmentasi pemilih, salah satu segmen yang paling cepat pertumbuhannya adalah pemilih pemula. Untuk menjangkau pemilih pemula dalam sosialisasi pemilu, KPU melakukan rekrutmen terhadap pelajar dan mahasiswa. Kedua kelompok pemilih ini diberikan kursus pemilu dan selanjutnya mereka diberi tugas untuk melaksanakan sosialisasi pemilu pada kelompok teman sebaya mereka, misalnya teman-teman mereka yang ada di dalam sekolah atau kampus. Fenomena ini menunjukkan peran penting dari kelompok teman sebaya sebagai agen sosialisasi politik.

d. Media massa

Pada masyarakat komunikasi seperti era ini, media massa memiliki peran paling strategis sebagai agen sosialisasi politik. Media massa di era ini telah berfungsi mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, cara bertindak, dan sikap politik seseorang. Pengaruh media massa saat ini bersifat massif, berskala besar, bahkan segera. Misalnya, apa yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dalam hitungan menit melalui media sosial. Oleh karena peran media yang begitu penting, semua partai politik berusaha menggunakan sebanyak-banyaknya media massa sebagai agen sosialisasi politik. Media massa di zaman ini telah menjadi satu-satunya agen yang dapat mempengaruhi masyarakat, misalnya terhadap kandidat tertentu. Tengoklah peristiwa pemilukada DKI yang baru lalu. Pada

pemilukada DKI 2017 yang berkontestasi ketika itu, bukan hanya para kandidat, bahkan juga ada pertarungan media massa. Media massa dapat menyediakan citra baik sekaligus citra buruk bagi politisi yang sedang berkontestasi. Oleh karena itu, setiap momentum pemilu di Indonesia, media massa harus digandeng oleh partai politik bersama politisinya.

Pemilahan agen-agen sosialisasi politik yang dibuat oleh Damsar memiliki kemiripan dengan pemilahan yang dilakukan oleh Elly M.Setiadi dan Usman Kolip. Mereka membagi dua kelompok agen sosialisasi, yaitu *secondary group* dan *primary group*. Kelompok pertama terdiri dari pemerintah, sekolah, media massa, dan partai politik. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari teman sebaya (*peer groups*) dan keluarga.⁸

Agen yang baru dari Setiadi dan Kollip adalah peran partai politiiik sebagai agen sosialisasi politik. Peran partai politik sebagai agen sosialisasi politik memang kerap dibahas dalam literatur-literatur yang menulis tentang partai politik, diantaranya buku yang di tulis Koirudin tahun 2004 dengan judul Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi. Dalam bab 3 buku ini penulis memaparkan lima fungsi partai politik, yakni fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik, dan fungsi komunikasi politik.⁹

Sosialisasi politik sebagai suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap poltiik, dan etika politik memerlukan intervensi partai poltiik sebagai pilar utama demokrasi. Setiap partai politik memiliki target terhadap sosialisasi politik. Memang ada banyak target partai politik melakukan sosialisasi politik, namun yang paling riil dari target partai politik adalah mengkonstruksi kembali perilaku politik masyarakat dalam memilih. Untuk konsteks Indonesia saat ini, perilaku sebagian besar pemilih masih emosional dan tradisional. Kondisi pemilih yang demikian dapat berdampak pada lahirnya

⁸ Elly M.Setiadi & Usman Kollip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta, Kencana Prenadammedia Group, 2013), hlm.171

⁹ Koirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 86.

lembaga-lembaga dan suprastruktur politik yang juga tradisional. Maka tugas utama partai politik dalam melaksanakan sosialisasi politik adalah memperbaharui konstruksi perilaku memilih dari emosional menjadi rasional. Oleh karena itu, sebaiknya partai politik tidak boleh menjadi agen yang justru memelihara perilaku pemilih emosional atau tradisional. Partai politik bertanggung jawab atas terbangunnya perilaku pemilih rasional.

3. Pemahaman Siswa Madrasah Aliyah Darul Muhajirin Tentang Pemilu Sebelum Paparan Materi Kepemiluan

Sebelum penyampaian materi kepemiluan dilakukan pengabdian terlebih dahulu membuat pretest pada peserta untuk mengetahui bagaimana pemahaman Siswa/Siswi MA Darul Muhajirin Praya tentang pemilihan umum (Pemilu). Jumlah peserta dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini sebanyak 30 orang. Deskripsi jawaban peserta sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.
Pemahaman Siswa/Siswi MA Darul Muhajirin tentang Pemilu sebelum Paparan Materi

| No | Pertanyaan | Jawaban | Jumlah | % |
|----|---------------------------------------|---|--------|----|
| 1 | Apa yang Anda ketahui tentang pemilu? | Kegiatan memilih presiden, gubernur dan bupati, serta DPR, DPRD | 15 | 50 |
| | | Kegiatan kampanye dan bagi-bagi sembako | 10 | 33 |
| | | Perebutan kekuasaan | 5 | 17 |
| | | Σ | 100 | |
| 2 | Apakah Anda setuju dengan golput ? | Setuju | 15 | 50 |
| | | Tidak setuju | 10 | 33 |
| | | Ragu-ragu | 5 | 17 |
| | | Σ | 100 | |

Sumber: Hasil pretest

Tabel 2. memperlihatkan sebelum materi kepemiluan dipaparkan oleh narasumber, pemahaman siswa/siswi tentang makna pemilu masih terbatas. Meskipun demikian 50 % mereka memahami pemilu sebagai kegiatan memilih presiden, gubernur dan bupati, serta

DPR, DPRD; 33 % memahami pemilu sebagai kegiatan kampanye dan bagi-bagi sembako; dan 17 % memahami pemilu sebagai perebutan kekuasaan.

4. Pemahaman Siswa/Siswi MA Darul Muhajirin Tentang Pemilu Sesudah Paparan Materi Kepemiluan

Setelah paparan materi kepemiluan diberikan, pengabdian membuat posttest kepada peserta untuk mengetahui bagaimana pemahaman Siswa/Siswi MA Darul Muhajirin Praya tentang pemilu. Setelah diberikan materi kepemiluan, hasilnya sebagaimana tabel 3

Tabel 3
Pemahaman Siswa/Siswi MA Darul Muhajirin Tentang Pemilu Sesudah Paparan Materi

| No | Pertanyaan | Jawaban | Jumlah | % |
|----|--|---|--------|----|
| 1 | Apakah Anda mengetahui tentang pemilu? | Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden | 25 | 83 |
| | | Sarana sirkulasi kepemimpinan politik | 6 | 17 |
| | | Σ | 100 | |
| 2 | Apakah Anda setuju dengan golput? | Setuju | 5 | |
| | | Tidak setuju | 28 | 93 |
| | | Ragu-ragu | 2 | 7 |
| | | Σ | 100 | |

Sumber: Hasil Posttest

Tabel 3. memperlihatkan adanya perubahan pemahaman siswa/siswi tentang pemilu sekaligus perubahan sikap mereka terhadap isu golput setelah selesai pemaparan materi oleh narasumber. Ketika ditanya apa yang anda ketahui tentang pemilu? Sebanyak 83 % mereka mampu memberikan jawaban dengan sangat baik, hanya 17 % yang memberikan jawaban kurang baik. Sedangkan ketika ditanya apakah anda setuju dengan golput? Sebanyak 93 % menyatakan tidak setuju, dan hanya 7 % yang masih ragu-ragu.

Penutup

Dari proses penyelenggaraan penganabdian masyarakat di atas, memperlihatkan hasil yang ditunjukkan oleh program pendidikan pemilih sebagai tematik kegiatan ini. Sebelum penyelenggaraan pengabdian masyarakat dilakukan pemahaman siswa/siswi tentang makna pemilu masih sangat terbatas. Sebanyak 50 % mereka memahami pemilu sebagai kegiatan memilih presiden, gubernur dan bupati, serta DPR, DPRD; 33 % memahami pemilu sebagai kegiatan kampanye dan bagi-bagi sembako; dan 17 % memahami pemilu sebagai perebutan kekuasaan. Dan setelah pengabdian masyarakat dilakukan, terjadi perubahan pemahaman siswa/siswi tentang pemilu sekaligus perubahan sikap mereka terhadap isu golput setelah selesai pemaparan materi oleh narasumber. Sebanyak 83 % mereka mampu memberikan jawaban dengan sangat baik, hanya 17 % yang memberikan jawaban kurang baik. Sedangkan sikap mereka tentang golput, sebanyak 93 % menyatakan tidak setuju, dan hanya 7 % yang masih ragu-ragu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pemilih efektif sebagai metode terhadap meningkatnya pengetahuan dan keterampilan siswa/siswi tentang kepemiluan serta berpengaruh terhadap sikap politik mereka menolak golput. Dan terbangunnya komitmen mereka berpartisipasi dalam pemilu.

Daftar Pustaka

- Damsar, Prof, Dr.,2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Gatra, A.A.Said & Moh.Dzulkiyah Said,2007,*Sosiologi Politik Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung, Pustaka Setia <http://kumpulan-berita-unik.blogspot.co.id/2014>, dikutp tanggal 25 Februari 2017
- Koirudin, 2004, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Komisi Pemilihan Umum RI, *Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI Tahun 2014*.
- Setiadi, Elly, M. & Usman Kollip, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group

Sunarto, Kumanto, 2004, *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*, Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia

Suryadi, Budi, 2007, *Sosiologi Politik; Sejarah, Definisi, dan
Perkembangan Konsep* Jogjakarta, IRCiSoD